

Siaran Pers

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS JALIN KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

JAKARTA – Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri bagi penajaman perencanaan pembangunan. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Imron Bulkin saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (1/3), di Bappenas.

Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebelumnya antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri yang diteken pada tanggal 29 Januari 2013. Tindak lanjut ini cukup lama, mengingat banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam termasuk penyiapan infrastruktur, terutama dampak kebijakan pemanfaatan Data Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, dan KTP-el bagi Kementerian PPN/Bappenas secara luas.

Imron Bulkin mengatakan melalui kerjasama ini Kementerian PPN/Bappenas akan memperoleh akses terhadap data kependudukan dan menggunakannya untuk kepentingan penguatan kualitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, data kependudukan sangat penting bagi penyusunan perencanaan pembangunan ke depan dan melengkapi data-data yang lain yang telah ada. Dengan data kependudukan ini, Kementerian PPN/Bappenas dapat membuat analisis sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan. “Dengan adanya data kependudukan yang lengkap, Kementerian PPN/Bappenas dapat membuat analisis yang detil dalam banyak hal, sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran,” terang Imron Bulkin dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Imron Bulkin mengatakan Kementerian PPN/Bappenas sangat mendukung penerapan Nomor Induk Kependudukan dan KTP-el yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, mengingat permasalahan mendasar dari pencatatan kependudukan di Indonesia adalah permasalahan ketunggalan data. Data kependudukan yang dihimpun dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, utamanya dalam hal penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional. Disamping itu, data dan informasi lainnya juga diperoleh Kementerian PPN/Bappenas dari berbagai sumber melalui laporan dan/atau survei, antara lain dari BPS, BIG, Kementerian/Lembaga, bahkan dari institusi swasta.

Pada akhir sambutannya Imron Bulkin berharap setelah penandatanganan kerjasama, segera dirumuskan tindak lanjut berupa langkah-langkah teknis. “Kami percaya penandatanganan kerjasama merupakan langkah awal bagi kedua instansi, dan selanjutnya diperlukan berbagai langkah teknis untuk merealisasikan kemanfaatan yang diharapkan,” pungkas Imron Bulkin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya mengatakan bahwa sampai saat ini sudah 73 lembaga yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data penduduk. “Hari ini berarti penandatanganan kerjasama ke-74 dan merupakan suatu kehormatan bagi kami karena posisi Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis dalam perencanaan pembangunan nasional,” tutur Zudan Arif Fakrulloh. Dengan pemanfaatan data kependudukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, beliau berharap kualitas perencanaan pembangunan dapat lebih tajam dan lebih tepat sasaran.

Jakarta, 1 Maret 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile
(021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id